

	News Title : Mendag Zulkifli Hasan Luncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto	
	Media Name : koranindopos.com	Journalist : -
	Publish Date : 29 July 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan), Subani (Direktur utama PT Bursa Komoditi Nusantara), Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Bursa Kripto

Mendag Zulkifli Hasan Luncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto

dan Editor | Widyadina — 29 Juli 2023 | Berita



koranindopos.com - Jakarta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto pada hari ini, Jumat (27/7) di Jakarta. Peluncuran Bursa Berjangka Aset Kripto tersebut menjadi satu tonggak sejarah industri dan perdagangan Aset Kripto di Indonesia sekaligus mewujudkan ekosistem perdagangan aset kripto.

Bursa Berjangka Aset Kripto terbentuk atas kolaborasi Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan PT. Bursa Komoditi Nusantara, serta didukung penuh seluruh pelaku usaha dan Asosiasi.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Viteknologijepang dan UMM, Menteri Perekonomian, Rudy Salahuddin, Deputy Komisioner Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen (UJK) sekaligus Kepala Satuan Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Dedy, Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Lukman Kusumawati mewakili BAPPENAS, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Adi Budiono mewakili Kementerian Keuangan, dan Kasubdit IV MDSR Komdabasi Pui, Audi Sutemadji yang mewakili Baskom Fintek.

Salah itu, dari kalangan pelaku usaha hadir Direktur Utama PT. Bursa Komoditi Nusantara, Subani, Ph, Direktur Utama PT Kibang Berjangka Indonesia, Budi Setiawan, Direktur Utama PT. Ternet Depository Indonesia, Eric Suphan Wikasano, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, Robby.

Related Photo

- [Matahari Laporan Pertumbuhan Pengjualan Etor H23 Sebesar 3,25 Juli Rp 24 Triliun](#)
- [Jendro dan Anwar Bank Berkolaborasi Rencan Pendanaan Cash-In-Bank Pemakaian](#)
- [Risiko Sengketa Berjangkitan, 32 Perusahaan Raih Penghargaan SSG Award2023 by KCHATT](#)

Turut mendampingi Mendag yaitu Sekretaris Jenderal, Suharto, Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, Inspektur Jenderal, Fida Adiat, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan, Karan, Djal Huma Mendag Bidang Penyelenggaraan Perdagangan Internasional, Dan Vitocha Hendran, beserta Sekretaris Bappebti, Ony Andrianta dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti.

"Bentuk inisiasi kebijakan di bidang perdagangan Aset Kripto adalah pembentukan ekosistem kelembagaan. Dengan adanya ekosistem yang lengkap, masyarakat akan merasa aman dalam berinvestasi sehingga industri perdagangan Aset Kripto dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional," jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Pada 17 Juli 2023, Bappebti telah menyelenggarakan penandatanganan Bursa Berjangka Aset Kripto (CFI) kepada PT Bursa Komoditi Nusantara, Lembaga Kibang Berjangka Aset Kripto kepada PT Kibang Berjangka Indonesia, serta Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto kepada PT Ternet Depository Indonesia.

Hal ini selaras dengan arahan Presiden RI pada Forum Ekonomi Digital 2023, bahwa salah satu kunci mengembangkan ekonomi digital adalah menyebarkan inovasi dengan upaya menjaga kepercayaan publik. Regulasi yang ada harus bisa memberikan perlindungan konsumen dan membuat publik nyaman serta percaya dalam memanfaatkan layanan digital.

Dalam pertemuan tersebut, Mendag menegaskan, Kemandag melalui Bappebti akan terus meningkatkan pengawasan dan mitigasi risiko Perdagangan Aset Kripto pada masyarakat. "Aman dan kebijakan yang telah ditetapkan akan terus dievaluasi dan diperbarui untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang lebih maksimal di tengah industri Aset Kripto yang terus berkembang dengan cepat," tandasnya.

Salah itu, Zulkifli Hasan berharap, kolaborasi dan koordinasi Bappebti dengan seluruh stakeholder, asosiasi, dan lembaga terkait lainnya diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang relevan sehingga industri ini dapat berkembang dengan optimal. "Tetapi Bursa Aset Kripto, Lembaga Kibang dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto akan menjadikan transaksi Aset Kripto lebih transparan, efektif dan adil sehingga industri kripto di Indonesia dapat berjalan dan terjaga dengan baik, serta mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian melalui pemertaman regim," katanya.

Mendag juga berharap, Bursa Kripto yang telah ditetapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk terus melakukan literasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat terkait risiko, manfaat, dan potensi dari Perdagangan Aset Kripto. "Hal ini penting dilakukan karena berinvestasi dalam aset kripto mengandung risiko yang cukup tinggi karena sifatnya yang high risk-high return," tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Melalui peluncuran Bursa Berjangka Aset Kripto hari ini, Mendag Zulkifli Hasan juga mengajak seluruh stakeholder Perdagangan Aset Kripto di Indonesia untuk berkolaborasi meningkatkan literasi kepada masyarakat. "Iqumanya, agar Perdagangan Aset Kripto dapat berjalan lebih kondusif dan efektif," pungkasnya.

Mendag juga mengungkapkan dengan adanya proses pengalihan kewenangan pengawasan dan pengawasan perdagangan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK yang diatur dalam UU No. 4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) maka perlu diawal dengan baik.

"Proses pengalihan tersebut diharapkan dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan goncangan pada industri ini, sehingga masyarakat tidak perlu cemas dalam berinvestasi," kata Mendag Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Direktur utama PT Bursa Komoditi Nusantara, Subani mendukung, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi kripto dan aset digital, berbagai negara dan lembaga pemerintahan di seluruh dunia kini semakin menyadari pentingnya regulasi yang tepat dan cermat dalam mengelola ekosistem kripto. Regulasi ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi para pelaku industri dan pengguna kripto.

Subani juga menyampaikan, PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFE) yang ditetapkan sebagai lembaga resmi perdagangan aset pada pasar kripto di Indonesia akan menjalankan tanggung jawabnya seperti arahan dari Bappebti.

"Kami berkomitmen menjaga adanya ketertutupan, tata kelola, dan transparansi, dan akuntabilitas dalam business-modelnya. Dengan dukungan key stakeholder seperti regulator, anggota bursa, lembaga kustodian, klibang, dan kalangan trader serta investor, CFE akan mengedukasi masyarakat agar literasi keuangan atas produk kripto ini makin baik di Indonesia," ungkap Subani.

Didid menegaskan bahwa pembentukan kelembagaan Aset Kripto ini adalah bukti pemerintah hadir dalam upaya menciptakan perdagangan aset kripto yang wajar dan adil untuk menjamin kepastian berinvestasi dan mengamankan perlindungan bagi masyarakat sebagai pelanggan.

Dalam rangkaian acara peluncuran Bursa Berjangka Aset Kripto, juga digelar Trade Talk bertema "Silu dan Kipras Tulus Kripto" yang menghadirkan sejumlah nara sumber dari akademisi, asosiasi, dan Bappebti serta dipandu oleh Myositer Silvana Tarigan. "Melalui Trade Talk ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman yang tepat kepada masyarakat tentang perdagangan aset kripto," kata Didid.

Sejak pertama kali diatur pada Juni 2016, perdagangan Aset Kripto di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai masyarakat masyarakat untuk berinvestasi di perdagangan aset kripto terus tumbuh dalam lima tahun terakhir (2018–2023). Hingga saat ini, perdagangan aset kripto tercatat telah memiliki 17,54 juta pelanggan terdaftar dengan rata-rata penambahan pelanggan setiap bulan sebesar 400,8 ribu orang.

Pada Januari–Juni 2023 transaksi perdagangan aset kripto mencapai Rp 69,44 triliun, pada 2022 sebesar Rp 306,8 triliun. Nilai transaksi tertinggi pernah dicapai pada 2021 yaitu sebesar Rp 669 triliun.

Didid juga menegaskan, Bappebti terus berkomitmen memperkuat pengembangan perdagangan Aset Kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan stakeholder, swasta, dan instansi terkait. "Penguatan literasi kepada masyarakat juga dilakukan dengan mengedukasi media massa agar masyarakat memperoleh informasi yang benar tentang Aset Kripto," imbuhnya.

Tidak lupa Didid mengajak seluruh pihak yang terkait dengan Perdagangan Aset Kripto agar tetap mengutamakan industri ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengutamakan keamanan bagi masyarakat. (n)